



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIT KERJA** : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AHMAD HASNI  
2. Jabatan : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALU  
3. NHK : 970141

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.450.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 411 m2/275 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, Rp. 450.000.000  
2. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/175 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , Rp. 500.000.000  
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , Rp. 250.000.000  
4. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , Rp. 250.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 64.000.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000  
2. MOTOR, HONDA NF 125 Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 52.979.527

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 1.566.979.527

**III. HUTANG** Rp. 318.680.550

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.248.298.977



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.